

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kerja Praktek

Audit mulai dihargai karena kemampuannya untuk memberikan jaminan independen terhadap kredibilitas informasi akuntansi, yang meningkatkan alokasi sumber daya dan efisiensi kontrak, semakin kompleksnya pertumbuhan transaksi bisnis dan standar akuntansi saat ini meningkatkan penambahan nilai terhadap potensi audit (DeFond & Zhang, 2014). Sebagai hasil dari peningkatan skandal akuntansi dalam beberapa tahun terakhir, fungsi audit internal telah mendapatkan perhatian mengesankan sebagai kontributor penting untuk tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan yang efektif, karena fungsi audit internal yang berkualitas tinggi difokuskan pada peningkatan pelaporan keuangan dengan memastikan kepatuhan standar (Prawitt, Smith, & Wood. D.A., 2008). Tata kelola perusahaan atau lebih dikenal sebagai *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak – hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sebagaimana yang dijelaskan oleh *Form of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (Widjaja & Mustamu, 2014).

Tjager (2003) dan Arafat (2008) menjelaskan bahwa untuk menciptakan kondisi *corporate governance* (CG) yang baik memberikan banyak manfaat sebagai

berikut (1) meningkatnya ketertarikan investor untuk berinvestasi dalam perusahaan dalam artian akan mempermudah akses pembiayaan, dikarenakan juga adanya kebijakan lembaga-lembaga keuangan besar dalam membiayai perusahaan melalui pinjaman atau ekuitas telah mensyaratkan kondisi CG di perusahaan tersebut atau dapat dikatakan bahwa perusahaan yang telah menerapkan CG akan memiliki akses yang lebih baik untuk modal internasional daripada perusahaan yang tidak atau belum menerapkan CG; (2) dengan adanya CG juga akan bisa menarik sumber daya manusia terbaik untuk mau kerja di perusahaan itu, serta akan dapat meningkatkan kualitas perusahaan, dan (3) selain itu praktik CG mencakup juga perlindungan hak pemegang saham, manajemen resiko yang sehat dan peningkatan pengungkapan serta transparansi keuangan (Radjagukguk, Ramantha , & Mimba, 2014). Terdapat hubungan yang signifikan antara *internal audit department* dan *good corporate governance* (Regoliosi & d'Eri, 2012). Menurut FCGI (2001), prinsip yang diperlukan dalam konsep GCG yaitu *fairness, disclosure and transparency, accountability, responsibility, dan independency* (Widjaja & Mustamu, 2014).

Penerapan GCG di Indonesia mulai diterapkan akhir-akhir ini termasuk dalam perusahaan milik negara atau kita lebih familiar dengan nama BUMN (Badan Usaha Milik Negara). BUMN sebagai perusahaan milik negara mempunyai karakteristik khusus, tidak hanya menyangkut kepemilikannya oleh negara tetapi juga peran yang diembannya sebagai “*Agen of Development*” yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional, mempunyai kegiatan utama menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana

(*lending*) (Gusnardi, 2006). GCG sangat erat kaitannya dengan peran audit internal atau untuk di BUMN lebih dikenal sebagai Satuan Pengawasan Intern (SPI). Keberadaan SPI pada BUMN di Indonesia berdasarkan PP No.3 Tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan BUMN bagian keempat pasal 45 dan UU No.19 Tahun 2003 pasal 67 bahwa setiap BUMN dibentuk SPI (Radjagukguk, Ramantha , & Mimba, 2014). Namun sebenarnya bukan hanya SPI saja yang bertanggung jawab terhadap GCG dalam suatu perusahaan tetapi personil perusahaan di semua tingkat dan eksekutif senior pada khususnya, harus juga bertanggung jawab untuk memahami konsep-konsep pengendalian internal dan membantu untuk mengelola dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif di perusahaan mereka (Moeller, Importance of the COSO Internal Control Framework, 2014).

Konsep pengendalian internal lingkungan pengendalian harus dimulai dengan dewan direksi dan manajemen senior, yang mendirikan apa yang kemudian dikenal sebagai manajemen “*tone at the top*” untuk suatu perusahaan (Moeller, COSO Internal Control Components: Control Environment, 2014). Selain itu Moeller (2014) juga menjelaskan bahwa kerangka pengendalian internal berbasis COSO untuk komponen penilaian risiko sebuah organisasi atau perusahaan mempunyai empat prinsip yaitu organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan, perusahaan mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola, organisasi menganggap potensi untuk penipuan dalam menilai risiko

terhadap prestasi tujuan, serta perusahaan mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal. Departemen SPI terdiri dari beberapa orang auditor yang biasanya menghadapi risiko audit secara keseluruhan, termasuk *inherent risk*, risiko pengendalian, dan risiko deteksi, bila ada kesalahan dalam prosedur perusahaan dan *auditor-controlled* pada pelaporan keuangan (Francis, 2011).

Berdasarkan PSAK No. 1 revisi tahun 2013 laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: (a) laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode; (b) laporan laba rugi komprehensif laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; (c) laporan perubahan ekuitas selama periode; (d) laporan arus kas selama periode; (e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan (ea) informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 36 dan 36A; dan (f) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D. Menurut *Statement of Financial Accounting Standards* (SFAS) No. 95, laporan arus kas merupakan pengganti laporan perubahan posisi keuangan dan menjadi bagian dari laporan keuangan. Laporan arus kas merupakan laporan yang sangat penting bagi investor dan kreditor, karena mereka lebih tertarik untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar deviden dan melunasi kewajiban-kewajibannya (Fajarwati, 2007).

IAS 7 dan PSAK No. 2 revisi 2009 menyebutkan bahwa *cash flow* merupakan kas masuk dan kas keluar atau setara kas. Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. PSAK No. 2 juga menjelaskan informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flows*) dari berbagai entitas.

Mengingat pentingnya *cash flow* dalam perusahaan maka PT. Pupuk Kujang yang merupakan salah satu BUMN, anak perusahaan dari PT. Pupuk Kujang tak serta merta memberikan perhatian khusus untuk *cash flow* sehingga dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) per tahun mengharuskan adanya LHP audit *cash flow*. Selama ini masalah yang dihadapi dalam prosedur audit *cash flow* adalah ketidaktepatan waktu pengumpulan data dari unit pemeriksaan yaitu biro akuntansi. Hal ini meperlambat proses pembuatan laporan hasil pemeriksaan *cash flow*. Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Prosedur Audit Cash Flow pada PT. Pupuk Kujang Cikampek.**

1.2. Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan pelaksanaan kerja praktek pada PT. Pupuk Kujang adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui prosedur audit *cash flow* yang tersendat di departemen Pengawasan Keuangan SPI PT. Pupuk Kujang.
- 2) Untuk mengetahui hambatan yang terjadi di departemen Pengawasan Keuangan SPI PT. Pupuk Kujang terkait prosedur audit *cash flow* yang tersendat.
- 3) Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan departemen Pengawasan keuangan SPI PT. Pupuk Kujang dalam menangani hambatan yang terjadi pada prosedur audit *cash flow* yang tersendat.

1.3. Kegunaan Kerja Praktek

Adapun beberapa kegunaan yang penulis peroleh melalui kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil laporan kerja praktek ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran berupa saran atas hambatan yang terjadi pada departemen Pengawasan Keuangan SPI PT. Pupuk Kujang.

1.3.2. Kegunaan Akademis

Secara akademis, hasil laporan kerja praktek ini diharapkan dapat menjadi gambaran perbandingan antara teori yang terkait pengendalian internal dengan kenyataan di lapangan serta menjadi referensi bagi perkembangan ilmu akuntansi khususnya terkait auditing.

1.4. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1. Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun tempat pelaksanaan kerja praktek yaitu PT. Pupuk Kujang yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 39 Cikampek 41373, Jawa Barat – Indonesia.

1.4.2. Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Waktu pelaksanaan kerja praktek dilaksanakan pada 5 Agustus sampai dengan 5 September 2015 dengan jam kerja sebagai berikut:

Tabel 1-1. Aktivitas Kerja Praktek

No.	Aktivitas	Hari	Waktu	Penempatan
1	Kerja Praktek	Senin-Kamis	07.00-16.00	Departemen Pengawasan Keuangan
		Jumat	07.00-16.30	
2	Istirahat	Senin-Kamis	11.30-12.30	Departemen Pengawasan Keuangan
		Jumat	11.30-13.00	
3	Libur	Sabtu & Minggu	-	-

Tabel 1-2. Waktu Kerja Praktek

No.	Kegiatan	Bulan					
		Jul-15	Agu-15	Sep-15	Okt-15	Nov-15	Des-15
I	Persiapan						
	1. Pencarian Tempat Kerja Praktek						
	2. Pengambilan Surat Permohonan Kerja Praktek ke Sekretariat Jurusan Akuntansi						
II	Pelaksanaan						
	1. Pelaksanaan Kerja Praktek						
	2. Pengumpulan Data						
	3. Pembuatan Laporan Kerja Praktek						
III	Pelaporan						
	1. Bimbingan						
	2. Evaluasi Laporan Kerja Praktek						
	3. Pengumpulan Laporan Kerja Praktek						